

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA  
DALAM PENERAPAN *PROJECT BASED LEARNING* (PjBL)  
DI SDN 017 SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA**

**Dewi Anggraeni, Santi Rande**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 14, Nomor 1, 2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Dalam Penerapan *Project Based Learning* (PjBL) Di Sekolah Dasar Negeri 017 Sungai Pinang Kota Samarinda.

Pengarang : Dewi Angraeni

NIM : 2202016103

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 18 Mei 2026

**Pembimbing,**



**Dr. Santi Rande, M.Si**

**NIP 19751001 200604 2 001**

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b>	<b>: eJournal Administrasi Publik</b>
----------------------	---------------------------------------

<b>Volume</b>	<b>: 14</b>
---------------	-------------

<b>Nomor</b>	<b>: 1</b>
--------------	------------

<b>Tahun</b>	<b>: 2026</b>
--------------	---------------

<b>Halaman</b>	<b>: 27-38</b>
----------------	----------------

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DALAM PENERAPAN *PROJECT BASED LEARNING* (PjBL) DI SDN 017 SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA**

**Dewi Angraeni<sup>1</sup>, Santi Rande<sup>2</sup>**

## ***Abstrak***

*Implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka dalam penerapan Project Based Learning (PjBL) di SDN 017 Sungai Pinang Kota Samarinda sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik. Implementasi kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan PjBL. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling yang melibatkan kepala sekolah, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, guru, peserta didik, dan orang tua siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka dalam penerapan PjBL telah berjalan secara operasional, namun masih memerlukan penguatan kualitas pelaksanaan. Pada aspek karakteristik masalah, ditemukan perbedaan kesiapan dan kemampuan belajar peserta didik dalam pelaksanaan proyek. Pada aspek kemampuan kebijakan, sekolah telah memperoleh dukungan pelatihan dan pedoman implementasi, namun pemahaman guru terhadap PjBL masih belum merata. Sementara itu, pada aspek kondisi lingkungan eksternal, dukungan sekolah dan komitmen guru menjadi faktor pendukung, sedangkan keterbatasan sarana dan waktu pembelajaran, variasi pemahaman orang tua, dan monitoring administratif menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan.*

**Kata Kunci :** *Implementasi Kebijakan, Kurikulum Merdeka, Project Based Learning (PjBL), Pendidikan Dasar*

## **Pendahuluan**

Sistem pendidikan di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan diterapkannya Kurikulum Merdeka, sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Struktur dari kurikulum merdeka yaitu kegiatan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [dewianggraeni130707@gmail.com](mailto:dewianggraeni130707@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

intrakurikuler, proyek penguatan profil belajar pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler (Susilowati, 2022). Salah satu metode pembelajaran yang dianjurkan dalam kebijakan ini adalah Project Based Learning (PjBL), yang memberikan pengalaman belajar berbasis proyek agar siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam terhadap suatu konsep melalui eksplorasi, kerja sama tim, dan pemecahan masalah secara kritis. Pentingnya mengaplikasikan Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) yaitu dengan menggunakan masalah nyata yang terjadi pada masyarakat, karena tujuan dari pembelajaran Project Based Learning (PjBL) adalah memadukan pengetahuan yang didapatkan oleh siswa selama di kelas untuk diimplementasikan di dunia nyata. Di sisi lain, implementasi penerapan PjBL tidak selalu berjalan sesuai harapan. Studi dari Wahyuni & Iqbal (2024) mengungkapkan bahwa hanya 45% guru sekolah dasar yang merasa percaya diri dalam menerapkan PjBL.

Dalam konteks ini, SDN 017 Sungai Pinang, Samarinda, menjadi lokasi strategis untuk meneliti implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya pendekatan PjBL. Sekolah ini telah menerapkan Kurikulum Merdeka pada siswa kelas 1 dan 4, serta menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menitikberatkan pada pengembangan karakter dan soft skills siswa. Berdasarkan data sekolah wilayah Sungai Pinang tahun 2025, terdapat lima sekolah dasar negeri yang menerapkan Kurikulum Merdeka.

<b>Nama Sekolah</b>	<b>Alamat</b>	<b>Akreditasi</b>	<b>Kurikulum</b>
SDN 017 Sungai Pinang	Jl. Merdeka I	B	Kurikulum Merdeka
SDN 007 Sungai Pinang	Jl. Merdeka I	A	Kurikulum Merdeka
SDN 002 Sungai Pinang	Jl. Pelita	A	Kurikulum Merdeka
SDN 006 Sungai Pinang	Jl. Merdeka 1 No. 60 A	B	Kurikulum Merdeka
SDN 005 Sungai Pinang	Jl. DI. Panjaitan	A	Kurikulum Merdeka

Sumber : Diolah dari Data Sekolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas yang diperoleh dari website data sekolah dasar di Daerah Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2023-2025, dapat digambarkan bahwa meskipun Meskipun SDN 007, SDN 002, dan SDN 005 memiliki akreditasi yang lebih tinggi (A), SDN 017 dipilih karena beberapa alasan yang relevan secara akademik dan praktis, hal ini karena melalui data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, SDN 017 Sungai Pinang secara transparan mengakui bahwa proses penerapan PjBL masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sarana pendukung dan waktu

pembelajaran, variasi pemahaman dalam menyusun perangkat ajar, dan penilaian yang masih bersifat administratif.

Sekolah dengan akreditasi B umumnya menghadapi tantangan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan sekolah berakreditasi A. Hal ini karena sekolah dengan akreditasi tersebut masih merepresentasikan kondisi mayoritas sekolah dasar di Indonesia yang masih berproses menuju unggul. Oleh karena itu, SDN 017 Sungai Pinang lebih merepresentasikan mayoritas sekolah dasar di Indonesia yang belum berada dalam kategori unggul, sehingga hasil penelitian dapat lebih aplikatif secara luas dan diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai proses implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka. Berlandaskan penjelasan di atas, penelitian terhadap implementasi PjBL dalam Kurikulum Merdeka di SDN 017 Sungai Pinang menjadi sangat penting untuk mengisi kesenjangan kajian terhadap sekolah dengan tantangan moderat, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pendekatan PjBL mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah dasar negeri.

Mengingat bahwa PjBL menuntut peran aktif siswa dalam eksplorasi dan pemecahan masalah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya di sekolah dasar. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis proyek dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pemahaman konsep, kreativitas, serta keterampilan berpikir kritis siswa.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Administrasi Pembangunan dalam Pendidikan***

Menurut Dwight Waldo (1955:48), administrasi pembangunan adalah proses penyusunan dan implementasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem pemerintahan yang lebih efektif. Serupa dengan pengertian tersebut, Frederickson (1991:72) menyatakan bahwa administrasi pembangunan dalam pendidikan harus berorientasi pada implementasi kebijakan, pemerataan akses pendidikan, serta inovasi dalam metode pembelajaran. Tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka bahwa administrasi pendidikan mengandung arti pengelolaan sistem pendidikan yang fleksibel, adaptif, dan berbasis pada kebutuhan peserta didik. Hal ini juga lebih lanjut diatur dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan guna memastikan kualitas pembelajaran yang berbasis kompetensi dan karakter siswa, terutama dalam implementasi metode pembelajaran berbasis proyek (*Project Based*

*Learning/PjBL*), yang menjadi salah satu strategi utama dalam Kurikulum Merdeka.

### ***Kebijakan Publik***

Kebijakan publik sebagai teori berfokus pada bagaimana kebijakan dirumuskan, di implementasikan, dan dievaluasi. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini diadopsi di tingkat sekolah, terutama dalam penerapan PjBL yang memerlukan perubahan paradigma dalam pengajaran. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, kebijakan ini termasuk dalam kategori kebijakan substansif karena mengubah sistem pembelajaran dengan memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam menyusun metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, termasuk penerapan Project Based Learning (PjBL).

Definisi klasik dari Dye (2013) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan”, yang menunjukkan bahwa baik tindakan aktif maupun pasif dari pemerintah memiliki implikasi terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya mencerminkan kehendak politik, namun juga menjadi hasil dari proses deliberatif yang kompleks antara berbagai aktor dan institusi. Dalam dunia pendidikan, kebijakan publik berfungsi sebagai mekanisme untuk meringkai arah perubahan sistemik dan memastikan adanya keberlanjutan dalam pembaharuan pengajaran dan manajerial. Dengan demikian, penilaian terhadap implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka tidak hanya terletak pada dokumen kebijakan, tetapi juga pada praktik dan respons aktor pelaksananya.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Implementasi kebijakan merupakan fase determinan dalam siklus kebijakan publik yang menjembatani rumusan normatif dengan realitas empiris. Pada tahap ini, keputusan politik yang telah diformulasikan diterjemahkan ke dalam tindakan administratif, program, serta praktik operasional di lapangan. Mazmanian dan Sabatier (2000) mendefinisikan implementasi sebagai proses pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya berbentuk undang-undang atau peraturan eksekutif, yang tidak hanya mengidentifikasi masalah publik, tetapi juga menetapkan tujuan serta instrumen untuk mencapainya. Dalam perspektif ini, implementasi dipengaruhi oleh *tractability of the problem* (kemudahan masalah untuk diatasi), kemampuan kebijakan dalam menstruktur proses pelaksanaan, serta variabel eksternal yang berada di luar kontrol langsung pembuat kebijakan.

Dalam literatur mutakhir, implementasi diposisikan sebagai titik konversi antara policy outputs dan policy outcomes. Dimana artinya, bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, namun juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan, diadaptasi, dan dijalankan dalam konteks sosial yang nyata. Meter dan Horn dalam Winarno (2005:102) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh aktor publik maupun nonpublik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan formal sebelumnya.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008:68) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun juga dapat berbentuk keputusan-keputusan atau perintah eksekutif yang penting, keputusan tersebut mengklasifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai strategi untuk mengorganisasikan atau mengatur proses pelaksanaannya. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas birokrasi secara teknis, tetapi juga oleh sejauh mana konteks eksternal mampu menciptakan legitimasi, koordinasi, dan komitmen kolektif dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### ***Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier***

Model implementasi yang dikembangkan oleh Danie Mazmanian dan Paul A. Sabatier (2023) menegaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh rumusan kebijakan itu sendiri, namun juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik, dan bagaimana kondisi eksternal mempengaruhinya. Tiga kelompok variabel utama dari model ini yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni: (1) karakteristik masalah (*tractability of problem*), yaitu tingkat kemudahan atau kesulitan masalah yang menjadi sasaran kebijakan untuk dipecahkan, termasuk kompleksitas masalah, keragaman perilaku kelompok sasaran; (2) karakteristik kebijakan (*ability of statue to structure implementation*) seperti kemampuan kebijakan dalam mengarahkan proses implementasi melalui kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan mekanisme pengawasan yang mendukung (Subarsono, 2005). (3) kondisi lingkungan (*non statutory variables affecting implementation*) mencakup faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, dukungan masyarakat, serta komitmen dari para pelaksana kebijakan.

Model implementasi kebijakan Mazmanian & Sebatier (1983) digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis untuk menilai proses implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka. Penelitian ini berupaya menggambarkan sejauh mana implementasi Kurikulum Merdeka telah berjalan secara efektif di tingkat sekolah dasar. Jika salah satu faktor mengalami hambatan, maka kebijakan berisiko tidak berjalan sesuai harapan. Model ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi kesenjangan antara perancangan kebijakan, kapasitas pelaksana, dan praktiknya di lapangan. Selain itu, aspek kondisi eksternal sangat krusial, khususnya dalam konteks sekolah dasar, karena perbedaan latar belakang siswa, kondisi rumah, serta dukungan masyarakat memengaruhi bagaimana proyek dapat dirancang dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini penting guna merekomendasikan

strategi yang lebih sesuai agar PjBL dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan pembelajaran yang bermakna.

### ***Kurikulum Merdeka***

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia (Bahri, 2017). Kementerian pendidikan resmi menetapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022/2023 di lembaga pendidikan Indonesia. Kurikulum merdeka berperan dalam memberikan kebebasan kepada siswa untuk menciptakan metode pembelajaran berkualitas pada kondisi atau kebutuhan lingkungan belajar siswa. Keunggulan kurikulum merdeka yang dijelaskan oleh Kemendikbud (2022) bahwa kurikulum ini berfokus pada materi esensial dan mengembangkan kompetensi peserta didik pada fasenya. Hal ini sependapat juga dengan studi yang dilakukan oleh Yusuf & Arfiansyah (2024) bahwa dalam kurikulum merdeka, seorang guru diharuskan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mendesain pembelajaran.

Salah satu pendekatan utama dalam Kurikulum Merdeka adalah Project Based Learning (PjBL), yang menekankan proses pembelajaran melalui keterlibatan aktif peserta didik dalam merancang dan menyelesaikan proyek nyata yang bermakna. Disisi lain, Kurikulum Merdeka tetap mencerminkan arah kebijakan yang progresif menuju sistem pendidikan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik secara holistik. Implementasi model kurikulum dalam Kurikulum Merdeka dapat dilihat dari penerapan *Project-Based Learning* (PjBL) dan *differentiated learning* yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan cara yang lebih mandiri dan berbasis pengalaman. Menurut Thomas (2000: 34), pembelajaran berbasis proyek memiliki lima karakteristik utama:

1. Berorientasi pada pertanyaan atau tantangan: Peserta didik memulai pembelajaran dengan menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah nyata.
2. Autentik dan berbasis dunia nyata: Pembelajaran didesain agar relevan dengan kehidupan sehari-hari.
3. Kolaboratif: Peserta didik bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersama.
4. Berbasis refleksi: Peserta didik mengevaluasi dan merevisi pemahamannya secara berkelanjutan.
5. Menghasilkan produk nyata: Pembelajaran menghasilkan suatu karya yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan.

Dalam konteks SDN 017 Sungai Pinang, penelitian ini akan menganalisis bagaimana penerapan model kurikulum dalam Kurikulum Merdeka mendukung pembelajaran berbasis proyek.

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka dalam

penerapan Project-Based Learning (PjBL) di SDN 017 Sungai Pinang. Studi ini berfokus pada eksplorasi mendalam terkait bagaimana kebijakan ini diterapkan di tingkat sekolah dasar serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Bidang SMPN Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Kepala Sekolah, Guru, Murid, dan Wakil Orang Tua Murid SDN 017 Sungai Pinang Kota Samarinda. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33).

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Dalam Penerapan Project Based Learning (PjBL) di SDN 017 Sungai Pinang Kota Samarinda***

#### ***1. Karakteristik Masalah (Tractability Of Problem)***

Karakteristik masalah dalam implementasi Kurikulum Merdeka melalui *Project Based Learning* (PjBL) menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan yang muncul memiliki tingkat keterlacakan yang relatif tinggi, namun dengan tingkat kompleksitas yang bervariasi. Permasalahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek kapasitas pelaksana, keterbatasan struktural, karakteristik peserta didik, hingga perbedaan pemahaman konseptual terhadap kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian di SDN 017 Sungai Pinang, karakteristik masalah dalam implementasi Kurikulum Merdeka melalui *Project Based Learning* (PjBL) menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan yang muncul memiliki tingkat keterlacakan yang relatif tinggi, namun dengan tingkat kompleksitas yang bervariasi. Permasalahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek kapasitas pelaksana, keterbatasan struktural, karakteristik peserta didik, hingga perbedaan pemahaman konseptual terhadap kebijakan itu sendiri.

Secara keseluruhan, karakteristik masalah dalam implementasi Kurikulum Merdeka melalui PjBL di SDN 017 Sungai Pinang dapat dikategorikan memiliki tingkat keterlacakan yang tinggi, karena sebagian besar permasalahan dapat diidentifikasi secara jelas oleh para pelaksana. Namun demikian, tingkat kompleksitas masalah tidak bersifat homogen. Permasalahan teknis cenderung lebih mudah diatasi, sementara permasalahan yang berkaitan dengan kapasitas pelaksana, keterbatasan struktural, serta perbedaan pemahaman konseptual memerlukan penanganan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas guru, penyamaan persepsi kebijakan, serta penyesuaian terhadap kondisi struktural agar implementasi PjBL dapat berjalan secara lebih optimal, konsisten, dan merata.

#### ***2. Karakteristik Kebijakan (Ability of Statue to Structure Implementation)***

Dalam perspektif implementasi kebijakan, Mazmanian & Sabatier menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan proses pelaksanaannya. Hal ini mencakup kejelasan tujuan, konsistensi aturan, ketersediaan pedoman teknis, serta mekanisme koordinasi dan pengawasan yang mampu mengarahkan pelaksana secara sistematis. Karakteristik kebijakan Kurikulum Merdeka dalam penerapan Project Based Learning (PjBL) secara umum telah memiliki arah yang jelas dan progresif. Tujuan kebijakan dipahami oleh guru, kepala sekolah, hingga pihak dinas sebagai upaya mendorong pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, serta menekankan pengembangan kompetensi berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Namun demikian, pada tataran implementasi, kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan pelaksanaan masih menghadapi beberapa keterbatasan. Meskipun arah kebijakan telah dipahami, pedoman teknis terkait perancangan dan pelaksanaan PjBL belum sepenuhnya diinternalisasi secara merata oleh seluruh guru. Hal ini terlihat dari masih adanya variasi dalam praktik pembelajaran, di mana sebagian guru telah menerapkan PjBL secara terstruktur, sementara sebagian lainnya masih memaknai PjBL sebatas pemberian tugas proyek.

Selain itu, mekanisme pelatihan yang bersifat representatif dimana hasil temuan penelitian yang penulis lakukan, koordinasi antar guru di SDN 017 Sungai Pinang dilakukan melalui rapat formal serta diskusi informal, khususnya setelah sebagian guru mengikuti pelatihan Kurikulum Merdeka. Hal ini sejalan dengan temuan Ismawati dan Hasan (2025) yang menyatakan bahwa diskusi internal sekolah berperan strategis dalam memperkuat adaptasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Namun demikian, karena pelatihan tidak diikuti oleh seluruh guru, proses transfer pengetahuan masih bersifat informal dan belum terstruktur dalam skema pendampingan internal yang sistematis. Dari sisi pengawasan, meskipun telah terdapat mekanisme monitoring melalui supervisi kepala sekolah dan dinas pendidikan sebanyak dua kali per semester, fokus pengawasan masih cenderung bersifat umum dan administratif. Evaluasi belum secara spesifik menilai kualitas proses PjBL secara mendalam.

Di sisi lain, fleksibilitas yang diberikan oleh Kurikulum Merdeka menjadi pisau bermata dua dalam implementasi kebijakan. Di satu sisi, fleksibilitas memberikan ruang inovasi bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Namun di sisi lain, tanpa pedoman teknis yang cukup rinci dan pengawasan yang substantif, fleksibilitas tersebut berpotensi menimbulkan variasi kualitas implementasi antar kelas bahkan antar guru dalam satu sekolah. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa secara konseptual, karakteristik kebijakan Kurikulum Merdeka telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menstrukturkan implementasi, terutama dari segi kejelasan tujuan dan arah kebijakan. Namun secara operasional, kemampuan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pada aspek pemerataan

pemahaman teknis, mekanisme pelatihan, serta sistem pengawasan yang belum berbasis kualitas substantif.

### **3. Kondisi Lingkungan Eksternal (Non Statutory Variable Affecting Implementation)**

Dalam analisis implementasi kebijakan, kondisi lingkungan eksternal atau variabel *non-statutory* dipandang sebagai faktor determinan yang memengaruhi stabilitas serta keberlanjutan implementasi kebijakan. Lingkungan eksternal mencakup dukungan sosial, ekonomi, politik, serta kapasitas sumber daya yang berada di luar teks formal kebijakan. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi bukan hanya persoalan “apa yang dirumuskan”, tetapi juga “di lingkungan seperti apa kebijakan tersebut dijalankan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara institusional, lingkungan eksternal SDN 017 Sungai Pinang tergolong relatif mendukung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam mengembangkan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik serta melakukan monitoring rutin dua kali per semester. Dukungan ini mencerminkan adanya legitimasi politik dan administratif terhadap implementasi Kurikulum Merdeka.

Dari sisi sumber daya manusia, guru di SDN 017 Sungai Pinang menunjukkan komitmen dan motivasi yang cukup tinggi dalam menjalankan PjBL. Komitmen tersebut merupakan bentuk modal sosial yang penting dalam perspektif implementasi kebijakan, karena sikap positif pelaksana dapat memperkuat daya tahan kebijakan terhadap kendala teknis (Mazmanian & Sabatier, 1983). Kemudian dari perspektif lingkungan peserta didik, hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial antar siswa dalam pembelajaran berbasis proyek cenderung mendukung proses kolaboratif yang menjadi karakter utama PjBL. Siswa menunjukkan antusiasme yang lebih tinggi ketika bekerja dalam kelompok, serta memiliki kecenderungan untuk saling membantu dalam menyelesaikan proyek. Namun demikian, dinamika kelompok yang tidak merata, seperti adanya anggota yang kurang aktif, menjadi tantangan dalam menjaga kualitas kerja sama.

Selain itu, dari aspek infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah tergolong memadai untuk mendukung implementasi dasar PjBL, seperti ketersediaan LCD dan perangkat teknologi pembelajaran. Namun, belum tersedianya laboratorium khusus atau ruang eksplorasi tertentu membatasi variasi dan kompleksitas proyek yang dapat dilakukan, serta waktu pembelajaran yang terbatas membuat hanya beberapa kelas saja yang mampu melaksanakan program PjBL dikelas, sehingga hal ini juga perlu menjadi perhatian. Tanpa intervensi penguatan pada aspek-aspek tersebut, terdapat potensi munculnya variasi mutu implementasi yang dapat memengaruhi konsistensi dan kualitas implementasi kebijakan di tingkat pelaksana.

### ***Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dalam Penerapan Project Based Learning (PjBL) Di SDN 017 Sungai Pinang Kota Samarinda***

Faktor-faktor pendukung implementasi pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) bersifat saling berkaitan, di mana kejelasan regulasi dan arah kebijakan memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan program, kemudian diperkuat oleh komitmen guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek secara konsisten. Dukungan serta fleksibilitas dari Dinas Pendidikan turut mendorong kelancaran implementasi melalui pemberian ruang inovasi kepada sekolah, sementara ketersediaan fasilitas pembelajaran dasar yang memadai menjadi penunjang utama agar kegiatan proyek dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi PjBL tidak hanya bergantung pada satu aspek saja, tetapi memerlukan sinergi antara kebijakan, kesiapan pelaksana, dukungan institusi, dan sarana pendukung pembelajaran.

Selain itu, terdapat faktor penghambat implementasi yang saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas pembelajaran. Keterbatasan waktu pembelajaran menyebabkan pelaksanaan proyek belum berjalan maksimal, sementara variasi pemahaman guru terhadap konsep PjBL membuat implementasi pembelajaran belum terlaksana secara konsisten dan optimal. Selain itu, perbedaan pemahaman orang tua terhadap PjBL turut memengaruhi dukungan terhadap kegiatan proyek siswa. Hambatan lainnya terlihat pada dinamika kerja kelompok, seperti rendahnya kerja sama, ketimpangan partisipasi, dan perbedaan kemampuan siswa yang memengaruhi efektivitas kolaborasi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pemahaman seluruh pihak serta pengelolaan pembelajaran yang lebih terstruktur agar implementasi PjBL dapat berjalan lebih efektif.

### **Penutup**

#### ***Kesimpulan***

Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dalam penerapan *Project Based Learning* (PjBL) di SDN 017 Sungai Pinang Kota Samarinda telah berjalan secara operasional dan nyata di tingkat sekolah. Sehingga dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut :

1. Karakteristik Masalah (*Tractability of Problem*) : Permasalahan dalam implementasi PjBL tergolong memiliki tingkat kelacakan yang tinggi karena bersifat konkret dan dapat diidentifikasi secara jelas, baik pada aspek teknis, kapasitas, maupun struktural. Namun demikian, meskipun mudah dikenali, beberapa hambatan seperti keterbatasan waktu, fasilitas, dan kemampuan siswa tetap berdampak pada kualitas pembelajaran.
2. Kemampuan Kebijakan dalam Menstrukturkan Implementasi (*Ability of Statue to Structure Implementation*) : Kebijakan telah memberikan arah yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta didukung oleh mekanisme koordinasi dan pelaksanaan di sekolah. Namun, implementasi masih belum sepenuhnya

sistematis, ditandai dengan ketimpangan kapasitas guru, variasi pemahaman terhadap PjBL, serta evaluasi yang masih berorientasi administratif.

3. Kondisi Lingkungan Eksternal (*Non Statutory Variables Affecting Implementation*) : Lingkungan eksternal tergolong cukup kondusif dengan adanya dukungan dari dinas pendidikan, fasilitas dasar, serta partisipasi orang tua dan siswa. Meskipun demikian dukungan tersebut masih belum sepenuhnya substansif, khususnya dalam hal pemerataan sarana, literasi pedagogis orang tua, dan kualitas interaksi belajar siswa.

Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dikategorikan cukup efektif, namun masih berada pada tahap penguatan kualitas.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung dilapangan mengenai implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dalam penerapan Project Based Learning (PjBL) di SDN 017 Sungai Pinang mengalami hambatan baik teknis maupun non teknis, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai pelengkap dalam penelitian dan menjadi bahan referensi bagi sekolah dan aktor kepentingan yang lain, sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pelatihan dan sosialisasi bagi guru serta mengembangkan sistem monitoring yang tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga menilai kualitas proses pembelajaran PjBL secara substantif.
2. Guru diharapkan dapat meningkatkan pemahaman orang tua mengenai konsep dan tujuan PjBL agar tercipta dukungan serta sinergi antara pembelajaran di sekolah dan pendampingan di rumah.
3. Sistem monitoring dan evaluasi perlu diarahkan pada kualitas implementasi pembelajaran, seperti kedalaman proyek, relevansi kompetensi, dan refleksi peserta didik, sehingga pengawasan kebijakan lebih bermakna secara akademik dan pedagogis.
4. Sekolah diharapkan dapat mengoptimalkan sarana pendukung, memperkuat koordinasi internal, serta meningkatkan kapasitas guru melalui kolaborasi dan komunitas belajar agar implementasi PjBL berjalan lebih sistematis, konsisten, dan efektif.

### **Daftar Pustaka**

- Afifi, E. H. N., Arvianti, L. A., & Keliata, K. (2024). *Inisiatif guru sekolah dasar menyediakan media dan bahan di tengah keterbatasan fasilitas laboratorium*. *Science Education Research (Search) Journal*, 2(2), 54–66. <https://doi.org/10.47945/search.v2i2.1469>
- Bahri, S. (2017). Pengembangan kurikulum dasar dan tujuannya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 15. <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.61>

- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson.
- Ismawati, A. F., & Hasan, I. (2025). Efforts to improve the quality of learning through Kurikulum Merdeka at SMA N 11 Surabaya. *Proceedings Series of Educational Studies*. <https://conference.um.ac.id/index.php/pses>
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.
- Susilowati, E. (2022). Penguatan nilai karakter Pelajar Pancasila melalui implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(3), 331–342. <https://doi.org/10.21831/jpk.v12i3.51569>
- Wahyudi, W., Efendi, E., Usman, N. F., & Shofwan, I. (2024). *Project-based learning dalam Kurikulum Merdeka Belajar* (Issue January).
- Winarno, B. (2005). *Teori dan proses kebijakan publik*. Mediapress.
- Imawan, Riswandha. 1997. *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).